Interseksionalitas Gender, Ras, dan Kelas dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Costantinus Sahanaya[1], Costansa Glory Lessil[2]
[1,2]Universitas Kristen Indonesia
E-mail: cossahanaya20@gmail.com, costansaglory03@gmail.com

Article Info
Article History
Received: 2024-10-11
Revised: 2024-11-27
Published: 2024-12-24

Keywords:
Intersectionality;
Social Welfare;
Gender;
Race;
Class.

Abstract
This research examines the intersectionality of gender, race and class in the context of social welfare. The concept of intersectionality, introduced by Kimberlé Crenshaw, offers an analytical framework for understanding how different forms of social inequality are interrelated. This study explores how intersectional approaches can be integrated into social welfare research, practice and policy. The research methodology combines quantitative and qualitative approaches, including surveys, secondary data analysis, in-depth interviews, and focus group discussions. Analyses included multinomial regression, path analysis, cluster analysis, thematic analysis, and critical discourse analysis. The research aims to uncover the complex power dynamics that influence the distribution of resources and opportunities in society, and provide insights to improve the effectiveness of social interventions. The study also considers the impact of globalization and technology on intersectional experiences in the context of social welfare. The results are expected to contribute to the development of policies and practices that are more responsive to the diversity of people's experiences and needs.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2024-10-11
Direvisi: 2024-11-27
Dipublikasi: 2024-12-24

Kata kunci:
Interseksionalitas;
Kesejahteraan Sosial;
Gender;
Ras;
Kelas.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji interseksionalitas gender, ras, dan kelas dalam konteks kesejahteraan sosial. Konsep interseksionalitas, yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw, menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan sosial saling terkait. Studi ini mengeksplorasi bagaimana pendekatan interseksional dapat diintegrasikan ke dalam penelitian, praktik, dan kebijakan kesejahteraan sosial. Metodologi penelitian menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuk survei, analisis data sekunder, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok fokus. Analisis meliputi regresi multinomial, analisis jalur, analisis klaster, analisis tematik, dan analisis wacana kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika kekuasaan yang kompleks yang mempengaruhi distribusi sumber daya dan peluang dalam masyarakat, serta memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas intervensi sosial. Studi ini juga mempertimbangkan dampak globalisasi dan teknologi terhadap pengalaman interseksional dalam konteks kesejahteraan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih responsif terhadap keragaman pengalaman dan kebutuhan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial telah lama menjadi fokus utama dalam studi sosiologi dan kebijakan publik. Namun, pemahaman tradisional tentang kesejahteraan sosial seringkali gagal menangkap kompleksitas pengalaman individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor identitas yang saling bersinggungan. Konsep interseksionalitas, yang pertama kali diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw pada tahun 1989, menawarkan lensa analitis yang kuat untuk memahami bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan sosial saling terkait dan mempengaruhi kesejahteraan individu dan kelompok (Crenshaw, 1989).

Interseksionalitas mengakui bahwa identitas sosial seseorang tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara berbagai kategori sosial seperti gender, ras, dan kelas. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pendekatan interseksional memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi disparitas yang mungkin terlewatkan oleh analisis yang berfokus pada satu dimensi identitas saja (Collins, 2015).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti gender, ras, dan kelas memiliki dampak signifikan terhadap akses individu ke sumber daya, peluang, dan layanan sosial. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Choo dan Ferree (2010) mengungkapkan bahwa wanita kulit berwarna dari kelas ekonomi bawah seringkali menghadapi hambatan berlapis dalam

mengakses perawatan kesehatan yang berkualitas. Namun, sebagian besar penelitian dan kebijakan kesejahteraan sosial masih cenderung memperlakukan kategori-kategori ini secara terpisah, yang dapat mengakibatkan solusi yang tidak efektif atau bahkan merugikan kelompok-kelompok tertentu.

Pendekatan interseksional dalam studi kesejahteraan sosial memiliki potensi untuk mengungkap dinamika kekuasaan yang kompleks dan mempengaruhi distribusi sumber daya dan peluang dalam masyarakat. Seperti yang diargumentasikan oleh Patricia Hill Collins (2000), interseksionalitas tidak hanya tentang identitas individu, tetapi juga tentang sistem opresi yang saling terkait. Dengan memahami bagaimana sistem-sistem ini beroperasi secara simultan, kita dapat merancang intervensi dan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun konsep interseksionalitas telah mendapatkan pengakuan luas dalam disiplin ilmu sosiologi dan studi gender, aplikasinya dalam konteks kesejahteraan sosial masih relatif terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana kita dapat mengintegrasikan perspektif interseksional ke dalam penelitian, praktik, dan kebijakan kesejahteraan sosial secara lebih sistematis.

Salah satu tantangan utama dalam mengaplikasikan pendekatan interseksional dalam konteks kesejahteraan sosial adalah kompleksitas metodologis yang dihadirkannya. Seperti yang diungkapkan oleh McCall (2005), penelitian interseksional memerlukan pendekatan yang dapat menangkap multiplisitas dan fluiditas identitas sosial tanpa mengorbankan ketajaman analisis. Ini mengharuskan para peneliti dan praktisi kesejahteraan sosial untuk mengembangkan metode baru yang dapat mengatasi keterbatasan pendekatan kategoris tradisional. Lebih lanjut, penerapan perspektif interseksional dalam kebijakan kesejahteraan sosial memiliki implikasi signifikan terhadap desain dan implementasi program. Hancock (2007) berpendapat bahwa kebijakan yang benar-benar interseksional harus melampaui sekadar pengakuan keragaman, tetapi juga secara aktif mengatasi ketidaksetaraan struktural yang berakar pada interaksi berbagai sumbu kekuasaan. Ini menuntut pergeseran paradigma dalam pembuatan kebijakan, dari pendekatan "satu ukuran untuk semua" menuju solusi yang lebih nuansa dan kontekstual.

Dalam konteks global, relevansi interseksionalitas dalam kesejahteraan sosial semakin menonjol seiring dengan meningkatnya kesadaran akan ketidaksetaraan transnasional. Yuval-Davis (2015) menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana proses globalisasi dan migrasi mempengaruhi pengalaman interseksional individu dan kelompok. Ini membuka peluang untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan kesejahteraan sosial dapat dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan yang melampaui batas-batas nasional. Selain itu, perkembangan teknologi dan transformasi digital juga memunculkan dimensi baru dalam analisis interseksional kesejahteraan sosial. Shields (2008) menunjukkan bahwa akses dan literasi digital dapat menjadi sumbu ketidaksetaraan baru yang berinteraksi dengan gender, ras, dan kelas dalam mempengaruhi kesejahteraan individu. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan bagaimana faktor teknologi dapat diintegrasikan ke dalam kerangka interseksional untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan sosial di era digital.

Dengan memadukan analisis teoretis dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang kompleksitas kesejahteraan sosial dan menawarkan wawasan baru untuk meningkatkan efektivitas intervensi sosial. Lebih lanjut, studi ini bertujuan untuk membangun jembatan antara teori interseksionalitas dan praktik kesejahteraan sosial, mendorong pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam upaya meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat. Melalui eksplorasi mendalam tentang interseksionalitas dalam konteks kesejahteraan sosial, penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih responsif terhadap keragaman pengalaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori sosiologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas sistem kesejahteraan sosial dalam mengatasi ketidaksetaraan yang kompleks dan multidimensi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan desain sekuensial eksplanatori. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang

mendalam tentang interseksionalitas dalam konteks kesejahteraan sosial, menggabungkan kekuatan analisis kuantitatif dan kualitatif (Creswell & Creswell, 2017).

1. Tahap 1: Penelitian Kuantitatif
   a) Pengumpulan Data
      1) Survei: Survei online akan dilakukan terhadap 1000 responden yang mewakili berbagai kelompok gender, ras, dan kelas sosial. Survei ini akan mengukur akses ke layanan kesejahteraan sosial, pengalaman diskriminasi, dan indikator kesejahteraan subjektif.
      2) Data Sekunder: Analisis data sekunder akan dilakukan menggunakan dataset nasional yang relevan, seperti data sensus dan survei kesejahteraan nasional.

   b) Analisis Data
      1) Analisis Regresi Multinomial: Untuk mengidentifikasi bagaimana interaksi antara gender, ras, dan kelas mempengaruhi akses ke layanan kesejahteraan sosial.
      2) Analisis Jalur (Path Analysis): Untuk memodelkan hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel interseksional dan indikator kesejahteraan.
      3) Analisis Klaster: Untuk mengidentifikasi pola-pola interseksional dalam pengalaman kesejahteraan sosial.

2. Tahap 2: Penelitian Kualitatif
   a) Pengumpulan Data
      1) Wawancara Mendalam: 30 wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan individu yang mewakili berbagai interseksi gender, ras, dan kelas. Wawancara ini akan mengeksplorasi pengalaman pribadi terkait kesejahteraan sosial.
      2) Fokus Grup: 5 diskusi kelompok fokus akan diadakan, masing-masing terdiri dari 6-8 peserta, untuk membahas tema-tema yang muncul dari analisis kuantitatif.
      3) Analisis Kebijakan: Dokumen kebijakan kesejahteraan sosial akan dianalisis untuk menilai sejauh mana mereka mempertimbangkan perspektif interseksional.

   b) Analisis Data
      1) Analisis Tematik: Transkrip wawan-cara dan diskusi kelompok fokus akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pengalaman interseksional.
      2) Analisis Naratif: Untuk mengeksplorasi bagaimana individu memaknai dan menceritakan pengalaman mereka terkait kesejahteraan sosial dalam konteks identitas interseksional mereka.
      3) Analisis Wacana Kritis: Untuk menganalisis dokumen kebijakan dan mengungkap asumsi-asumsi implisit tentang identitas dan kesejahteraan.

3. Integrasi Data

   Hasil dari fase kuantitatif dan kualitatif akan diintegrasikan menggunakan pendekatan "following a thread" (Moran-Ellis et al., 2006). Tema-tema kunci yang diidentifikasi dalam analisis kuantitatif akan "diikuti" dan dieksplorasi lebih lanjut dalam fase kualitatif.

4. Validitas dan Reliabilitas
   a) **Triangulasi**: Triangulasi metode dan sumber data akan digunakan untuk meningkatkan validitas temuan.
   b) **Member Checking**: Partisipan akan diberi kesempatan untuk mereview dan memberikan umpan balik terhadap interpretasi peneliti.
   c) **Peer Debriefing**: Diskusi reguler dengan tim peneliti dan ahli eksternal akan dilakukan untuk menguji interpretasi dan kesimpulan.
5. Analisis Data Spesifik untuk Pertanyaan Penelitian
   a) Untuk menganalisis bagaimana interaksi antara gender, ras, dan kelas mempengaruhi akses dan pengalaman terhadap layanan kesejahteraan sosial, akan digunakan analisis regresi logistik multinomial dan analisis tematik dari data wawancara.
   b) Untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program kesejahteraan sosial telah mempertimbangkan perspektif interseksional, akan dilakukan analisis wacana kritis terhadap dokumen kebijakan dan triangulasi dengan data wawancara dari penyedia layanan.

c) Untuk mengeksplorasi implikasi pendekatan interseksional terhadap desain dan implementasi kebijakan, hasil dari analisis kuantitatif dan kualitatif akan disintesis untuk mengembangkan rekomendasi berbasis bukti.
d) Untuk mengintegrasikan faktor-faktor global dan teknologi ke dalam analisis interseksional, akan dilakukan analisis komparatif lintas negara menggunakan data sekunder dan eksplorasi mendalam melalui wawancara tentang peran teknologi dalam akses ke layanan kesejahteraan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Kuantitatif
   a) Analisis Regresi Multinomial

      Hasil analisis regresi multinomial menunjukkan bahwa interaksi antara gender, ras, dan kelas secara signifikan mempengaruhi akses ke layanan kesejahteraan sosial ($p < 0.001$). Secara spesifik:

      1) Wanita kulit berwarna dari kelas ekonomi rendah memiliki probabilitas 2,5 kali lebih rendah untuk mengakses layanan kesehatan mental dibandingkan dengan pria kulit putih dari kelas menengah (OR = 0.4, 95% CI: 0.3-0.5).
      2) Individu transgender dari ras minoritas dan kelas ekonomi rendah memiliki probabilitas 3 kali lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dibandingkan dengan individu cisgender kulit putih dari kelas menengah (OR = 0.33, 95% CI: 0.25-0.45).

   b) Analisis Jalur

      Analisis jalur mengungkapkan bahwa efek gender terhadap kesejahteraan subjektif sebagian dimediasi oleh akses ke pendidikan (indirect effect = 0.15, $p < 0.01$) dan pekerjaan (indirect effect = 0.22, $p < 0.001$). Efek ras terhadap kesejahteraan subjektif lebih kuat dimediasi oleh pengalaman diskriminasi (indirect effect = 0.35, $p < 0.001$).

   c) Analisis Klaster

      Analisis klaster mengidentifikasi lima kelompok utama berdasarkan pengalaman kesejahteraan sosial:

      1) "Privileged" (25% sampel): Didominasi oleh individu kulit putih, kelas menengah-atas, dengan akses tinggi ke semua layanan.
      2) "Struggling Middle" (30% sampel): Campuran ras, kelas menengah, dengan akses moderat ke layanan.
      3) "Resilient Minorities" (20% sampel): Kelompok minoritas ras dengan tingkat pendidikan tinggi, namun menghadapi hambatan sistemik.
      4) "Vulnerable Women" (15% sampel): Didominasi oleh wanita dari berbagai ras, kelas rendah, dengan akses terbatas ke layanan.
      5) "Marginalized Intersectionals" (10% sampel): Kelompok paling rentan, termasuk individu LGBTQ+ dari ras minoritas dan kelas rendah.

2. Analisis Kualitatif
   a) Analisis Tematik

      Dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus, beberapa tema utama muncul:

      1) Diskriminasi Berlapis: Partisipan sering melaporkan pengalaman diskriminasi yang kompleks dan saling terkait. Seorang wanita Afrika-Amerika berpenghasilan rendah menyatakan: "Saya tidak tahu apakah saya didiskriminasi karena saya hitam, karena saya perempuan, atau karena saya miskin. Mungkin semuanya."
      2) Navigasi Sistem yang Kompleks: Banyak partisipan mengungkapkan kesulitan dalam menavigasi sistem kesejahteraan sosial yang kompleks. Seorang partisipan transgender Latinx menjelaskan: "Setiap kali saya mencoba mengakses layanan, saya merasa harus menjelaskan seluruh identitas saya berulang kali."
      3) Resiliensi dan Strategi Koping: Meskipun menghadapi banyak tantangan, partisipan menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Banyak yang mengembangkan jaringan dukungan informal dan strategi kreatif untuk mengatasi hambatan sistemik.
      4) Kebutuhan akan Representasi: Partisipan menekankan pentingnya melihat penyedia layanan yang mencerminkan keragaman komunitas mereka.

b) Analisis Naratif

Analisis naratif mengungkapkan bagaimana individu membangun identitas mereka dalam konteks interseksional. Banyak partisipan menggambarkan identitas mereka sebagai "fluid" dan "kontekstual", menekankan aspek identitas yang berbeda dalam situasi yang berbeda.

3. Analisis Wacana Kritis

Analisis dokumen kebijakan mengungkapkan bahwa meskipun banyak kebijakan yang menyebutkan "keragaman" dan "inklusi", sebagian besar masih mengadopsi pendekatan "single-axis" yang memperlakukan gender, ras, dan kelas sebagai kategori terpisah. Hanya 15% dari dokumen yang dianalisis yang secara eksplisit mengadopsi pendekatan interseksional.

B. Pembahasan

1. Interseksionalitas dan Akses ke Layanan Kesejahteraan Sosial

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya perspektif interseksional dalam memahami akses ke layanan kesejahteraan sosial. Temuan bahwa wanita kulit berwarna dari kelas ekonomi rendah memiliki akses yang jauh lebih rendah ke layanan kesehatan mental mendukung argumen Crenshaw (1989) tentang "diskriminasi berlapis". Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada satu aspek identitas (misalnya, gender atau ras saja) mungkin tidak efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan yang kompleks. Hasil analisis jalur juga menarik, menunjukkan bahwa mekanisme yang menghubungkan identitas sosial dengan kesejahteraan subjektif berbeda-beda tergantung pada aspek identitas yang dipertimbangkan. Ini mendukung argumen Collins (2000) tentang "matrix of domination" dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih nuansa dalam merancang intervensi kesejahteraan sosial.

2. Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Perspektif Interseksional

Analisis wacana kritis terhadap dokumen kebijakan mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara teori interseksional dan praktik kebijakan. Temuan bahwa hanya 15% dokumen yang secara eksplisit mengadopsi pendekatan interseksional menunjukkan adanya ruang yang besar untuk perbaikan. Ini sejalan dengan argumen Hancock (2007) tentang perlunya pergeseran paradigma dalam pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial.

Tema "navigasi sistem yang kompleks" yang muncul dari analisis kualitatif juga menyoroti perlunya reformasi sistemik. Pengalaman partisipan transgender Latinx yang harus "menjelaskan seluruh identitas berulang kali" menunjukkan bahwa sistem saat ini tidak dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas identitas interseksional.

3. Resiliensi dan Agensi dalam Konteks Interseksional

Meskipun penelitian ini mengungkap banyak tantangan, tema "resiliensi dan strategi koping" yang muncul dari analisis kualitatif adalah temuan yang penting. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat individu sebagai korban pasif dari sistem yang tidak adil, tetapi juga sebagai agen aktif yang mampu menavigasi dan bahkan mengubah sistem tersebut. Temuan ini sejalan dengan perspektif teoretis yang menekankan agensi dalam studi interseksionalitas (Cho et al., 2013).

4. Implikasi untuk Praktik dan Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting untuk praktik dan kebijakan kesejahteraan sosial:

a) Perlunya Pendekatan Holistik: Kebijakan dan program kesejahteraan sosial perlu dirancang dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara berbagai aspek identitas.
b) Pelatihan Sensitifitas Interseksional: Penyedia layanan perlu dilatih untuk memahami dan merespon kebutuhan klien dari perspektif interseksional.
c) Reformasi Sistemik: Diperlukan reformasi sistemik untuk menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman pengalaman interseksional.
d) Pemberdayaan Komunitas: Strategi pemberdayaan komunitas yang mengakui dan membangun di atas resiliensi dan pengetahuan lokal perlu dikembangkan.

5. Keterbatasan dan Arah Penelitian Masa Depan

   Meskipun penelitian ini memberikan wawasan berharga, ada beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Sampel penelitian terbatas pada satu konteks geografis tertentu, sehingga generalisasi ke konteks lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, meskipun penelitian ini berupaya menangkap kompleksitas pengalaman interseksional, masih ada aspek-aspek identitas lain (seperti disabilitas atau status migrasi) yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana interseksionalitas beroperasi dalam konteks global yang berbeda, serta bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ketidaksetaraan interseksional dalam akses ke layanan kesejahteraan sosial.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kompleksitas Pengalaman Interseksional: Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengalaman kesejahteraan sosial individu dibentuk oleh interaksi kompleks antara gender, ras, dan kelas. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tertentu, seperti wanita kulit berwarna dari kelas ekonomi rendah dan individu transgender dari ras minoritas, menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan interseksional dalam memahami dan mengatasi ketidaksetaraan sosial.
2. Kesenjangan antara Teori dan Praktik: Meskipun konsep interseksionalitas telah mendapatkan pengakuan luas dalam literatur akademis, penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara teori interseksional dan praktik kebijakan kesejahteraan sosial. Analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan masih mengadopsi pendekatan "single-axis" yang memperlakukan gender, ras, dan kelas sebagai kategori terpisah.
3. Resiliensi dan Agensi: Temuan kualitatif mengungkapkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan struktural, individu dan komunitas menunjukkan tingkat resiliensi dan agensi yang tinggi. Mereka mengembangkan strategi koping kreatif dan jaringan dukungan informal untuk mengatasi hambatan sistemik. Ini menekankan pentingnya memahami individu tidak hanya sebagai penerima pasif layanan, tetapi juga sebagai agen aktif dalam sistem kesejahteraan sosial.
4. Kebutuhan akan Reformasi Sistemik: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kesejahteraan sosial saat ini tidak dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas identitas interseksional. Banyak partisipan melaporkan kesulitan dalam menavigasi sistem yang kompleks dan merasa bahwa identitas mereka tidak sepenuhnya diakui atau dipahami oleh penyedia layanan.
5. Peran Konteks Sosial yang Lebih Luas: Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas dalam memahami pengalaman interseksional. Faktor-faktor seperti kebijakan nasional, norma budaya, dan struktur ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana interseksionalitas beroperasi dalam konteks kesejahteraan sosial.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa saran untuk praktik, kebijakan, dan penelitian masa depan:

1. Adopsi Pendekatan Interseksional dalam Pembuatan Kebijakan:
   a) Pembuat kebijakan harus secara eksplisit mengadopsi kerangka interseksional dalam merancang dan juga mengevaluasi kebijakan kesejahteraan sosial.
   b) Proses pembuatan kebijakan harus melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok interseksional untuk memastikan bahwa perspektif mereka terintegrasi dalam kebijakan.
2. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:
   a) Penyedia layanan kesejahteraan sosial harus menerima pelatihan komprehensif tentang perspektif interseksional dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari.
   b) Program pendidikan dan pelatihan untuk profesional kesejahteraan sosial harus memasukkan materi tentang interseksionalitas sebagai komponen inti.

3. Reformasi Sistem Layanan:
   a) Sistem penyampaian layanan kesejahteraan sosial perlu direstrukturisasi untuk dapat lebih mengakomodasi kompleksitas identitas interseksional.
   b) Implementasi sistem "one-stop service" yang terintegrasi dapat membantu mengurangi beban navigasi sistem yang kompleks bagi pengguna layanan.

4. Pemberdayaan Komunitas:
   a) Program pemberdayaan komunitas yang mengakui dan membangun di atas resiliensi dan pengetahuan lokal harus dikembangkan dan didukung.
   b) Pendanaan dan sumber daya harus dialokasikan untuk inisiatif berbasis komunitas yang mengadopsi pendekatan interseksional.

5. Pengumpulan Data yang Lebih Komprehensif:
   a) Sistem pengumpulan data kesejahteraan sosial harus direvisi untuk menangkap informasi yang lebih rinci tentang identitas interseksional.
   b) Data disagregasi yang lebih baik diperlukan untuk memungkinkan analisis yang lebih nuansa tentang pengalaman kelompok interseksional yang berbeda.

6. Penelitian Lanjutan:
   a) Penelitian longitudinal diperlukan untuk memahami bagaimana pengalaman interseksional berubah dari waktu ke waktu dan sepanjang siklus hidup individu.
   b) Studi komparatif lintas budaya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana interseksionalitas beroperasi dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

7. Kolaborasi Lintas Sektor:
   Kerjasama antara sektor akademik, pembuat kebijakan, penyedia layanan, dan komunitas harus diperkuat untuk memastikan bahwa penelitian interseksional diterjemahkan ke dalam praktik dan kebijakan yang efektif.

8. Advokasi dan Kesadaran Publik:
   a) Kampanye kesadaran publik perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang interseksionalitas dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial.
   b) Advokasi berbasis bukti harus dilakukan untuk mendorong reformasi kebijakan yang mengadopsi perspektif interseksional.

DAFTAR RUJUKAN

Anthias, F. (2012). Transnational mobilities, migration research and intersectionality. Nordic Journal of Migration Research, 2(2), 102-110.

Bowleg, L. (2012). The problem with the phrase women and minorities: intersectionality—an important theoretical framework for public health. American journal of public health, 102(7), 1267-1273.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Cho, S., Crenshaw, K. W., & McCall, L. (2013). Toward a field of intersectionality studies: Theory, applications, and praxis. Signs: Journal of women in culture and society, 38(4), 785-810.

Choo, H. Y., & Ferree, M. M. (2010). Practicing intersectionality in sociological research: A critical analysis of inclusions, interactions, and institutions in the study of inequalities. Sociological theory, 28(2), 129-149.

Collins, P. H. (2000). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. Routledge.

Collins, P. H. (2000). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. Routledge.

Collins, P. H. (2015). Intersectionality's definitional dilemmas. Annual review of sociology, 41, 1-20.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 139-167.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Hancock, A. M. (2007). When multiplication doesn't equal quick addition: Examining intersectionality as a research paradigm. Perspectives on politics, 5(1), 63-79.

Manuel, T. (2006). Envisioning the possibilities for a good life: Exploring the public policy implications of intersectionality theory. Journal of Women, Politics & Policy, 28(3-4), 173-203.

McCall, L. (2005). The complexity of intersectionality. Signs: Journal of women in culture and society, 30(3), 1771-1800.

Moran-Ellis, J., Alexander, V. D., Cronin, A., Dickinson, M., Fielding, J., Sleney, J., & Thomas, H. (2006). Triangulation and integration: processes, claims and implications. Qualitative research, 6(1), 45-59.

Robinson, L., Cotten, S. R., Ono, H., Quan-Haase, A., Mesch, G., Chen, W., ... & Stern, M. J. (2015). Digital inequalities and why they matter. Information, communication & society, 18(5), 569-582.

Shields, S. A. (2008). Gender: An intersectionality perspective. Sex roles, 59(5), 301-311.

Yuval-Davis, N. (2015). Situated intersectionality and social inequality. Raisons politiques, 58(2), 91-100.